

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia saat ini, dan emisi gas rumah kaca (GRK) adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap fenomena tersebut. Dalam studi hubungan internasional isu perubahan iklim menjadi krusial, terutama dalam konteks keamanan global. Fenomena ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat internasional seiring dengan meningkatnya suhu global yang mengancam keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi. Perubahan iklim sendiri merujuk pada variasi dalam pola iklim, seperti perubahan curah hujan dan suhu udara, yang terjadi dalam rentang waktu yang relatif panjang.<sup>1</sup>

Perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global, yang diakibatkan oleh peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lain di atmosfer bumi, yang dikenal sebagai gas rumah kaca. Akumulasi gas-gas tersebut menyebabkan peningkatan ketebalan lapisan atmosfer, yang berdampak pada peningkatan jumlah panas yang terperangkap di bumi dan mengakibatkan kenaikan suhu global.<sup>2</sup> Indonesia dengan hutan tropis yang luas, merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting dalam upaya pengurangan emisi GRK. Data Global Forest

---

<sup>1</sup> Edvin Aldrian, Mimin Karmini, and Budiman, "Adaptation and Mitigation of Climate Change in Indonesia," *Pusat Perubahan Iklim Dan Kualitas Udara BMKG*, no. 2 (2011): 174, [www.bmkg.go.id](http://www.bmkg.go.id).

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 31

Watch (2024) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam sepuluh negara penghasil emisi GRK terbesar di dunia, dengan deforestasi dan perubahan penggunaan lahan sebagai penyebab utama tingginya emisi tersebut.<sup>3</sup> Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup, dalam kurun waktu tahun 2000-2019, Indonesia kehilangan sekitar 24,7 juta hektar hutan, yang berdampak pada peningkatan emisi CO<sub>2</sub>.<sup>4</sup>

Masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi emisi gas rumah kaca adalah laju deforestasi yang masih tinggi, rendahnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan hutan berkelanjutan.<sup>5</sup> Serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan kebijakan lingkungan. Tidak hanya itu, kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti pembukaan lahan untuk perkebunan dan eksploitasi sumber daya alam, sering kali menjadi hambatan dalam upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, terbatasnya teknologi dan data yang akurat untuk memantau kondisi hutan secara real-time juga menjadi kendala dalam pengelolaan hutan yang efektif.<sup>6</sup>

Selain sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati, hutan berfungsi sebagai penyerap karbon alami, menyerap karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dari atmosfer melalui proses fotosintesis dan menyimpannya dalam biomassa. Deforestasi dan degradasi

---

<sup>3</sup> “Global Forest Watch. (2024). Indonesia Forest Loss Data,” Global Forest Watch, 2024, <https://www.globalforestwatch.org/>.

<sup>4</sup> Siti Nurbaya et al., *The State of Indonesian's Forest 2020*, 2020.

<sup>5</sup> Herpita Wahyuni and Suranto Suranto, “Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global Di Indonesia,” *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 148–62, <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>.

<sup>6</sup> Jurnal Pendidikan Ekonomi Anhar Drakel, “KAJIAN EKONOMI DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP” 6, no. 2 (2025): 294–304.

hutan melepaskan simpanan karbon ini ke atmosfer, menyumbang 20-80% emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia, khususnya dari kebakaran hutan.<sup>7</sup> Dengan demikian, hutan berperan dalam mengurangi konsentrasi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Forest and Climate Change Programme (Forclime) hadir sebagai salah satu inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Program ini merupakan kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Jerman, yang difokuskan pada perlindungan keanekaragaman hayati, pengurangan laju deforestasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.<sup>8</sup> Forclime dirancang untuk memberikan solusi yang komprehensif melalui pendekatan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Jerman dikenal sebagai salah satu negara pelopor utama dalam politik lingkungan global, terutama melalui kebijakan *Energiewende* atau transisi energi nasional yang menekankan peralihan dari bahan bakar fosil dan tenaga nuklir menuju energi terbarukan. Kebijakan ini menjadi simbol kepemimpinan Jerman dalam diplomasi lingkungan internasional, dengan target untuk mengurangi emisi karbon sebesar 65% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun

---

<sup>7</sup> Robin L. Chazdon et al., "When Is a Forest a Forest? Forest Concepts and Definitions in the Era of Forest and Landscape Restoration," *Ambio* 45, no. 5 (2016): 538–50, <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0772-y>.

<sup>8</sup> RACHIDI Nezha, "Peran Jerman Dalam Demonstration Activity-Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (DA-REDD+) Program Forest and Climate Change (FORCLIME) Di Indonesia Periode 2007-2012," 2014, 1–203.

1990, serta mencapai *net-zero emission* pada tahun 2045.<sup>9</sup> Komitmen ini memperlihatkan bahwa Jerman tidak hanya berorientasi pada kepentingan domestik, tetapi juga kepentingan dalam mengembangkan kemitraan lingkungan lintas negara sebagai bagian dari tanggung jawab global terhadap krisis iklim.

Jerman memilih Indonesia sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan program Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) karena posisi Indonesia yang krusial dalam menjaga stabilitas ekosistem global. Indonesia memiliki kawasan hutan seluas sekitar 94,1 juta hektare atau 49,1% dari total luas daratan nasional, menjadikannya salah satu negara dengan cadangan karbon terbesar di dunia. Hutan Indonesia menyimpan sekitar 25,18 gigaton karbon yang berperan dalam mitigasi perubahan iklim global.<sup>10</sup> Program Forclime tidak hanya terbatas pada upaya mitigasi perubahan iklim, tetapi juga untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional, seperti Kesepakatan Paris. Selain dengan Indonesia, Jerman juga menjalankan kerjasama serupa di Brazil, Meksiko, dan Kongo melalui program pengelolaan hutan partisipatif dan pembiayaan karbon. Program kerjasama yang dijalankan oleh Jerman dan Indonesia ini, diharapkan mampu menciptakan sinergi antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat posisi

---

<sup>9</sup> Federal Republic of Germany, "Update to the Long-Term Strategy for Climate Action of the Federal Republic of Germany," 2022, 1–13, [https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Anlage\\_2\\_Update\\_to\\_the\\_long-term\\_strategy\\_for\\_climate\\_action\\_of\\_the\\_Federal\\_Republic\\_of\\_Germany\\_02Nov2022\\_0.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Anlage_2_Update_to_the_long-term_strategy_for_climate_action_of_the_Federal_Republic_of_Germany_02Nov2022_0.pdf).

<sup>10</sup> Herman Anye and Novita Suryaningsih, "Evaluation of Forest and Climate Change Empowerment Programs of Long Laai Village, Kecamatan Segah Berau District," *Progress In Social Development* 2, no. 1 (2021): 13–20, <https://doi.org/10.30872/psd.v2i1.25>.

Indonesia di kancah global sebagai negara yang berkontribusi aktif dalam penanganan perubahan iklim.<sup>11</sup>

Dengan pemanfaatan teknologi modern, seperti pemantauan satelit dan sistem informasi geografis, Forclime berpotensi menjadi model pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan transparan, yang dapat diadaptasi oleh negara lain yang menghadapi tantangan serupa.<sup>12</sup> Tidak hanya melakukan hubungan bilateral dengan Jerman, Indonesia telah menjalin sejumlah kerjasama internasional yang berfokus pada isu perubahan iklim dan lingkungan. Salah satunya adalah kerjasama dengan Denmark melalui *Strategic Sector Cooperation (SSC)* dan *Environmental Support Programme (ESP)*. Kerjasama ini berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup dan energi terbarukan.<sup>13</sup> Indonesia juga aktif dalam kerjasama dengan Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional (USAID) dan *Center for International Forestry Research (CIFOR)*, fokus utama dari kerjasama ini adalah untuk mengurangi deforestasi dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari praktik pertanian, terutama kelapa sawit. Dan kerjasama bilateral dengan Jepang melalui

---

<sup>11</sup> Tommy Joko Putra, Sukma Sushanti, and Putu Titah Kawitri Resen, "Kepentingan Jerman Melalui Program FORCLIME Dalam Penanganan Deforestasi Di Kalimantan (2010-2016)," *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2019): 1–14, <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/29890/1/2af8f56df3b847db9aff68d66bb145a2.pdf>.

<sup>12</sup> Emilio Abad-Segura et al., "Remote Sensing Applied in Forest Management to Optimize Ecosystem Services: Advances in Research," *Forests* 11, no. 9 (2020), <https://doi.org/10.3390/f11090969>.

<sup>13</sup> Defi Setiawati, Agis Subagyo, and Tholhah, "Kerjasama Indonesia Dengan Denmark Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2017-2020," *Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional-FISIP\_UNJANI* 02, no. 01 (2025): 1–2.

*Joint Credit Mechanism* (JCM) yang fokusnya mencakup sektor energi, transportasi, industri, deforestasi dan pertanian.<sup>14</sup>

Di tingkat multilateral, Indonesia turut meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, yang menjadi dasar komitmen untuk menurunkan emisi GRK, komitmen ini diimplementasikan melalui Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), serta kerjasama dengan Uni Eropa dalam program *Support to Indonesia's Climate Change Response* (SICCR) sebagai upaya Indonesia menanggapi perubahan iklim.<sup>15</sup>

Pada penelitian ini penulis akan membahas peran Indonesia sebagai aktor dalam politik lingkungan global melalui program forclime, antara Jerman dan Indonesia dalam konteks kerjasama lingkungan. Hal tersebut dilakukan agar penulis dapat memahami peran dan fungsi masing-masing negara dalam kerjasama lingkungan internasional, Pentingnya kerjasama lingkungan dalam memperkuat legitimasi internasional, memberi ruang bagi negara maju maupun berkembang untuk saling mendukung dan bertanggung jawab dalam pencapaian target-target keberlanjutan, serta memperkuat hubungan diplomatik dan membuka peluang investasi hijau yang bermanfaat bagi ekonomi nasional.

---

<sup>14</sup> Gitania Refina M, "Kerjasama Joint Crediting Mechanism (JCM) Indonesia Dengan Jepang Dalam Mengurangi Emis Gas Rumah Kaca," *Universitas Bosowa Makassar*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

<sup>15</sup> Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38669/uu-no-16-tahun-2016>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam konteks ini, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang sebelumnya, tentang: “Bagaimana Peran Indonesia sebagai Aktor dalam Politik Lingkungan Global melalui Program Forclime?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Indonesia sebagai aktor dalam politik lingkungan global melalui Program Forclime oleh Jerman dalam mengurangi Gas Rumah Kaca di Indonesia, kurun waktu tahun 2010 hingga 2021. Serta menelaah posisi Indonesia sebagai negara berkembang dalam isu lingkungan internasional, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai dinamika aktor-aktor yang terlibat dalam kerjasama Indonesia-Jerman melalui program forclime.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat Akademis**

Manfaat akademis yang diharapkan adalah menambah pemahaman tentang bagaimana program FORCLIME yang dilaksanakan oleh Jerman dapat membantu Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini juga akan menunjang studi tentang kerjasama internasional dalam mengatasi perubahan iklim, khususnya antara negara maju dan negara berkembang. Selain itu, hasil penelitian

ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih efektif di Indonesia, serta memberikan wawasan baru tentang strategi yang bisa diterapkan untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada ilmu pengetahuan di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim.

### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai peran Indonesia sebagai aktor dalam politik lingkungan global melalui program Forclime yang dilakukan oleh Jerman di Indonesia, dalam mengurangi permasalahan emisi gas rumah kaca. Agar bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang tepat sasaran, untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim serta untuk meningkatkan kerjasama bilateral diantara kedua negara tersebut.

### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan penulis. Penelitian *pertama*, merupakan Jurnal Artikel yang berjudul **“The Effectiveness of Forest Conservation Policies and Programs”** yang ditulis oleh Jan Börner, Dario S., Sven W., dan Alexander P., tahun 2020.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan evaluasi berbasis kontra-faktual (*Counterfactual-based Evaluation*) dan meta-analisis.

---

<sup>16</sup> Jan Börner et al., “The Effectiveness of Forest Conservation Policies and Programs,” *Annual Review of Resource Economics* 12 (2020): 45–64, <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-110119-025703>.

Penulis artikel ini mengedepankan pentingnya konteks dalam evaluasi efektivitas kebijakan. Dengan membandingkan berbagai kategori instrumen dan metode evaluasi yang digunakan dalam penelitian, artikel ini menegaskan bahwa tidak ada satu solusi universal (*Silver Bullet*) untuk tantangan konservasi.

Penelitian *kedua*, merupakan jurnal artikel yang berjudul **“Kepentingan Jerman melalui Program FORCLIME dalam Penanganan Deforestasi di Kalimantan 2010-2016”**, yang ditulis oleh Tommy Joko Putra, Sukma Sushanti, dan Putu Titah Kawitri Resen, Universitas Udayana, tahun 2019.<sup>17</sup> Penulis menggunakan kerangka konsep Kerjasama Internasional dan konsep Kepentingan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mengangkat isu yang sangat relevan, yaitu deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan, yang merupakan masalah lingkungan kritis di era perubahan iklim. Penulis memberikan penjelasan mengenai dampak kerjasama internasional khususnya antara Jerman dan Indonesia. Penulis melakukan analisis mengenai kepentingan ekonomi dan politik Jerman dalam menerapkan program FORCLIME. Melalui kajian kepustakaan, penulis berhasil menyampaikan bagaimana kerjasama internasional dapat membentuk kebijakan domestik negara berkembang.

Penelitian *ketiga*, merupakan jurnal artikel yang berjudul **“Quantification of The Impact of Climate Change in Financial Reports: An Ambition Towards Net Zero Emissions”** yang ditulis oleh Mutahira Nur Insirat, Ningsih Puspitasari,

---

<sup>17</sup> Putra, Sushanti, and Resen, “Kepentingan Jerman Melalui Program FORCLIME Dalam Penanganan Deforestasi Di Kalimantan (2010-2016).”

Sunarti, Belinda Lestari, Hesti Indrayani, dan Muchriana Muchran, Universitas Muhammadiyah Makassar, tahun 2024.<sup>18</sup> Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengandalkan kajian literatur serta prinsip-prinsip yang diajukan oleh organisasi seperti TFCF (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures*), untuk menganalisis bagaimana dampak perubahan iklim dapat diukur dan dilaporkan dalam konteks akuntansi. Topik yang diangkat sangat relevan dengan kondisi global saat ini, terutama setelah penandatanganan Perjanjian Paris, yang menyoroti pentingnya tindakan kolektif untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Penulis dengan jelas menunjukkan urgensi untuk mengintegrasikan isu ini dalam laporan keuangan, yang merupakan aspek penting bagi pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang informatif.

Penelitian *keempat*, merupakan jurnal artikel yang berjudul **“Keberhasilan Implementasi *Forest and Climate Change Programme (FORCLIME)* oleh Indonesia-Jerman di Kalimantan”** yang ditulis oleh Angga Kurnia Setiawan dan Novita Putri Rudianty, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun 2020.<sup>19</sup> Penulis menggunakan konsep Analisis Difusi Norma Internasional berdasarkan Teori Finnemore dan Sikkink (1998) dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Artikel ini berhasil menghubungkan norma internasional, terutama dalam konteks perubahan iklim, dengan

---

<sup>18</sup> Mutahira Nur Insirat et al., “Quantification Of The Impact Of Climate Change In Financial Reports: An Ambition Towards Net Zero Emissions,” *Jurnal Penelitian IPTEKS* 9, no. 1 (2024): 102–13, <https://doi.org/10.32528/penelitianipteks.v9i1.1468>.

<sup>19</sup> Angga Kurnia Setiawan and Novita Putri Rudianty, “Keberhasilan Implementasi Forest And Climate Change Programme (Forclime) Oleh Indonesia – Jerman Di Kalimantan,” *Global and Policy Journal of International Relations* 8, no. 01 (2020): 19–33, <https://doi.org/10.33005/jgp.v8i01.2168>.

implementasi kebijakan di tingkat domestik. Penulis menjelaskan bagaimana norma yang dikembangkan dalam kerangka UNFCCC diinternalisasi ke dalam program-program kebijakan lokal, menjadikannya relevan dan kontekstual. Pemanfaatan teori dari Finnemore dan Sikkink tentang dinamika norma memberikan kerangka analitis untuk memahami mekanisme sosialisasi dan internalisasi norma, implementasi dan keberhasilan program. Ini akan memberikan pandangan yang lebih utuh tentang dinamika di lapangan.

Penelitian *kelima*, merupakan jurnal artikel yang berjudul **“Implementation of REDD+ Policies in Indonesia to Reducing Deforestation Amid Rising Earth’s Temperature”** yang ditulis oleh Galih W. Pradana, Hamsinah Djaing, Badrudin Kurniawan, dan Alycia Putri Febriani, Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2022.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan data untuk menganalisis implementasi kebijakan REDD+ di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan studi literatur, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data dengan sistematis. Ini memberikan landasan yang kuat bagi argumen yang diajukan dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi deforestasi dan implementasi REDD+. Penulis menyajikan analisis tentang perkembangan kebijakan REDD+ di Indonesia, termasuk tantangan dan prestasi yang diperoleh.

---

<sup>20</sup> Galih W. Pradana et al., “Implementation of REDD+ Policies in Indonesia to Reducing Deforestation Amid Rising Earth’s Temperature,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1111, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1111/1/012043>.

Penelitian *keenam*, merupakan jurnal artikel yang berjudul **“Implementation of Policy on Development of Forest Management Units (KPH) in West Nusa Tenggara Province”** yang ditulis oleh Madani Mukarom, Ermaya Suradinata, Detty Mulyati, dan Ali Hanafiah Muhi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang, tahun 2023.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Triangulasi, termasuk wawancara, analisis dokumen, dan observasi lapangan dan metode analisis pendekatan ASOCA (Aims, Strategies, Objectives, Control, Action). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Artikel ini secara jelas mengaitkan pengembangan KPH di NTB dengan kebijakan nasional melalui analisis peraturan seperti Undang-Undang No. 23/2014. Hal ini menunjukkan relevansi dan kekuatan dukungan regulasi dalam memfasilitasi pengelolaan hutan yang lebih baik.

Penelitian *ketujuh*, merupakan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Jerman Melindungi Hutan untuk Mitigasi Perubahan Iklim melalui Program Forclime di Kabupaten Kapuas Hulu (Indonesia) periode 2010-2018”** yang ditulis oleh Dhawi Hilmidia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2019.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Kerjasama Internasional dan konsep bantuan luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penulis menggambarkan kolaborasi antara Pemerintah Jerman dan Indonesia dalam konteks upaya mitigasi perubahan iklim, penulis

---

<sup>21</sup> Madani Mukarom et al., “Implementation of Policy on Development of Forest Management Units ( KPH ) in West Nusa Tenggara Province” 5, no. 2 (2023): 502–16.

<sup>22</sup> Dhawi Hilmidia, “Peran Pemerintah Jerman Melindungi Hutan untuk Mitigasi Perubahan Iklim melalui Program Forclime di Kabupaten Kapuas Hulu (Indonesia) periode 2010-2018” 2018.

menggunakan konsep kerja sama internasional dan bantuan luar negeri sebagai kerangka berpikir. Ini membantu dalam menjelaskan bagaimana dua negara dapat bersinergi dalam menghadapi tantangan lingkungan yang global. Artikel ini berfokus pada periode 2010-2018, namun tidak banyak dibahas mengenai potensi keberlanjutan program setelah 2020 atau dampak jangka panjang dari kerjasama ini.

Penelitian *kedelapan*, merupakan skripsi yang berjudul **“Kerjasama Indonesia dan Jerman melalui Program FORCLIME (*Forest and Climate Change Programme*) untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo tahun 2017-2020”** yang ditulis oleh Mahendra Andika Mahaluby, Universitas Kristen Satya Wacana, tahun 2023.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hijau (*green theory*) dan konsep Kerjasama Internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Memperhatikan bagaimana Indonesia, sebagai salah satu negara penghasil gas rumah kaca terbesar, berperan dalam isu lingkungan hidup. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, dengan fokus pada kolaborasi antara Indonesia dan Jerman melalui program FORCLIME, yang memberikan contoh konkret tentang bagaimana dua negara berusaha mengatasi masalah lingkungan.

---

<sup>23</sup> Mahendra Mahaluby, “Kerjasama Indonesia Dan Jerman Melalui Program FORCLIME (Forest and Climate Change Programme) Untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca Dari Sektor Kehutanan Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2017-2020,” *Modern at Large: Cultural Dimensions of Globalization* 00, no. 1980 (1997): 3–41, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016..>

Penelitian *kesembilan*, merupakan jurnal artikel yang berjudul **“An Overview of The Role of Forests in Climate Change Mitigation”** yang ditulis oleh Kyriaki Psistaki, Georgios Tsantopoulos, Anastasia K. Paschalidou, Tahun 2024.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan tinjauan literatur review. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Kelebihan utama dari artikel ini adalah komprehensivitasnya dalam menggabungkan berbagai aspek yang terkait dengan hutan dan perubahan iklim, termasuk kapasitas absorpsi karbon, proses biogeofisika seperti evapotranspirasi, serta dampak dari gangguan alami dan manusia terhadap ekosistem hutan. Penulis mengambil pendekatan berbasis data dan referensi dari penelitian sebelumnya, yang memberikan kredibilitas tambahan terhadap argumen yang dikemukakan. Metode analisis yang digunakan dalam artikel ini melibatkan penggabungan kajian literatur terkini tentang peran hutan dalam siklus karbon, dengan tinjauan terhadap berbagai studi yang menjelaskan efektivitas praktik reforestasi dan aforestasi.

Penelitian *kesepluluh*, merupakan jurnal artikel yang berjudul **“Implementasi Kebijakan dan Intervensi Politik terkait Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan”** yang ditulis oleh Irwan Parlaungan Panjaitan, Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, tahun 2024.<sup>25</sup> Penelitian ini merupakan Analisis Konseptual dengan menggunakan pendekatan Hukum dan

---

<sup>24</sup> Kyriaki Psistaki, Georgios Tsantopoulos, and Anastasia K. Paschalidou, “An Overview of the Role of Forests in Climate Change Mitigation,” *Sustainability (Switzerland)* 16, no. 14 (2024), <https://doi.org/10.3390/su16146089>.

<sup>25</sup> Irwan Parlaungan Panjaitan, “Implementasi Kebijakan Dan Intervensi Politik Terkait Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan,” *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 2 (2024): 34–54, <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i2.47>.

Politik dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini memberikan analisis tentang hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan intervensi politik dalam konteks lingkungan. Artikel ini menggali Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menunjukkan bagaimana regulasi dapat memiliki andil dalam perusakan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengembangkan argumen tentang bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintah dapat memengaruhi lingkungan secara langsung.

Penelitian *kesebelas*, merupakan skripsi yang berjudul **“Peran Indonesia sebagai Aktor dalam Politik Lingkungan Global melalui Program Forclime”** yang ditulis oleh Reiva Alifia Hannnizza, Universitas Muhammadiyah Malang, Angkatan 2021. Penulis menggunakan Teori *Actors in The Enviromental Arena* oleh Pamela Chasek. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif. Program FORCLIME oleh Jerman di Indonesia membuktikan bahwa kerja sama bilateral dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat keamanan lingkungan. Melalui dukungan teknis, keuangan, dan penguatan kapasitas lokal, FORCLIME berkontribusi langsung terhadap upaya Indonesia memenuhi komitmen perubahan iklim global dan mengatasi ancaman lingkungan domestik. Ini menunjukkan bahwa kerja sama bilateral yang terfokus dan adaptif dapat melengkapi upaya multilateral dalam menghadapi tantangan lingkungan transnasional.

Berdasarkan kesepuluh penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa program Forclime memiliki peranan yang signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengelola hutan secara berkelanjutan di Indonesia. Penelitian-penelitian ini menunjukkan jika program Forclime tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi emisi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kerjasama antara negara maju seperti Jerman dan negara berkembang seperti Indonesia menunjukkan pentingnya sinergi dalam upaya menghadapi perubahan iklim global.<sup>26</sup>

Metodologi yang digunakan dalam penelitian terdahulu bervariasi, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dampak program ini serta tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait.<sup>27</sup> Oleh karena itu, fokus penulis dalam penelitian ini nantinya akan dikembangkan dengan menganalisis peran Indonesia sebagai aktor dalam politik lingkungan global melalui program forclime antara tahun 2010 hingga 2021. Posisi penelitian terdahulu beserta jenis penelitian serta ringkasan temuan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dilihat melalui tabel berikut.

---

<sup>26</sup> Psistaki, Tsantopoulos, and Paschalidou, "An Overview of the Role of Forests in Climate Change Mitigation."

<sup>27</sup> Eko Nurmardiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 264–83, <https://doi.org/10.25123/vej.1422>.

**Tabel 1.1 Posisi Penelitian**

No.	Judul dan Nama Penelitian	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1.	<p><i>The Effectiveness of Forest Conservation Policies and Programs</i></p> <p>Jurnal Artikel oleh Jan Börner, Dario Schulz, Sven Wunder, dan Alexander Pfaff, Universitas Bonn, Jerman, Tahun 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian deskriptif kualitatif</li> <li>- Analisis data sekunder dan studi kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektivitas kebijakan konservasi hutan rata-rata rendah. Tidak ada “<i>Silver bullet</i>” atau solusi universal, dengan konteks lokal menjadi faktor kritis dalam keberhasilan program. Banyak intervensi dilakukan dalam kondisi tekanan rendah pada sumber daya alam, membatasi potensi dampaknya. Perlu penyelenggaraan konservasi dengan tujuan pembangunan lokal dan global.</li> </ul>
2.	<p>Kepentingan Jerman melalui Program FORCLIME dalam Penanganan Deforestasi di Kalimantan 2010-2016</p> <p>Jurnal Artikel oleh Tommy Joko Putra, Sukma Sushanti, dan Putu Titah Kawitri Resen., Universitas Udayana, Tahun 2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian deskriptif kualitatif</li> <li>- Konsep Kerjasama Internasional dan Kepentingan Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program FORCLIME membantu mengurangi emisi gas rumah kaca di Kalimantan dengan cara melestarikan hutan dan meningkatkan cara pengelolaan hutan yang lebih baik.</li> <li>- Ketergantungan Indonesia terhadap bantuan Jerman dalam pengelolaan hutan dapat menyebabkan tantangan pada kedaulatan politik, di mana pengaruh asing dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan domestik.</li> </ul>
3.	<p><i>Quantification of The Impact of Climate Change in Financial Reports: An Ambition</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode kualitatif</li> <li>- Studi literatur dengan prinsip TFCD (<i>Task</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran akan dampak perubahan iklim harus ditingkatkan di kalangan pemimpin dan</li> </ul>

	<p><i>Towards Net Zero Emissions</i></p> <p>Jurnal Artikel oleh Mutahira Nur Insirat, Ningsih Puspitasari, Sunarti, Belinda Lestari, Hesti Indrayani, dan Muchriana Muchran, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2024.</p>	<p><i>Force on Climate-related Financial Disclosures)</i></p>	<p>pengambil keputusan, agar mereka dapat mengelola risiko terkait perubahan iklim secara efektif. Salah satu kunci untuk mencapai target ini adalah penetapan harga karbon yang efektif, yang tidak hanya akan memberi insentif kepada perusahaan untuk mengurangi emisi tetapi juga akan mendorong investasi dalam teknologi energi baru dan terbarukan.</p> <p>- Informasi mengenai bagaimana perusahaan dapat terpengaruh oleh perubahan iklim akan membantu investor dan pemangku kepentingan lain dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memasukkan aspek-aspek terkait perubahan iklim ke dalam laporan keuangan mereka untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang risiko dan peluang bisnis di masa depan.</p>
4.	<p>Keberhasilan Implementasi Forest and Climate Change Programme (<i>FORCLIME</i>) oleh Indonesia-Jerman di Kalimantan</p>	<p>- Penelitian deskriptif analitis - Analisis Difusi Norma Internasional berdasarkan teori</p>	<p>- Program ini berhasil karena adanya kesesuaian antara norma internasional dan kebijakan domestik Indonesia, khususnya dalam pengurangan</p>

	<p>Jurnal Artikel oleh Angga Kurnia Setiawan dan Novita Putri Rudianty, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Tahun 2020.</p>	<p>Finnemore &amp; Sikkink (1998)</p>	<p>emisi karbon melalui pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi masyarakat setempat.</p> <p>-Indonesia meratifikasi UNFCCC, yang merupakan dasar bagi pengembangan kebijakan lingkungan. FORCLIME menggunakan mekanisme sosialisasi dan demonstrasi yang melibatkan masyarakat, sehingga dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.</p>
5.	<p><i>Implementation of REDD+ Policies in Indonesia to Reducing Deforestation Amid Rising Earth's Temperature</i></p> <p>Jurnal Artikel oleh Galih W. Pradana, Hamsinah Djaing, Badrudin Kurniawan dan Alycia Putri Febriani, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2022.</p>	<p>- Penelitian deskriptif kualitatif</p> <p>- Studi literatur dengan mengumpulkan data untuk menganalisis implementasi kebijakan REDD+ di Indonesia</p>	<p>- Kebijakan REDD+ telah dimulai sejak 2009, dengan dukungan dari pemerintah Norwegia, yang bertujuan untuk mengurangi emisi CO2 hingga 62%. Melalui berbagai langkah seperti moratorium izin eksploitasi, pengelolaan yang lebih ketat, dan peningkatan keterlibatan masyarakat lokal, Indonesia berhasil menurunkan tingkat deforestasi, dengan laporan menunjukkan penurunan hingga 75% pada periode 2019/2020.</p>
6.	<p><i>Implementation of Policy on Development of</i></p>	<p>- Penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>- Perkembangan KPH di NTB telah mencapai kemajuan signifikan,</p>

	<p><i>Forest Management Units (KPH) in West Nusa Tenggara Province</i></p> <p>Jurnal Artikel oleh Madani Mukarom, Ermaya Suradinata, Detty Mulyati, dan Ali Hanafiah Muhi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang, tahun 2023.</p>	<p>- Dengan metode triangulasi dan analisis strategi ASOCA (<i>Aims, Strategies, Obejctives, Control, Action</i>)</p>	<p>ditandai dengan pembentukan 16 unit KPH dari target 23 unit. Hal ini menunjukkan upaya yang konsisten dari pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan nasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya dukungan dari pemimpin daerah, seperti Gubernur dan pejabat pemerintah lainnya, yang memiliki peran kunci dalam memfasilitasi pengembangan KPH.</p>
7.	<p>Peran Pemerintah Jerman Melindungi Hutan untuk Mitigasi Perubahan Iklim melalui Program Forclime di Kabupaten Kapuas Hulu (Indonesia) Periode 2010-2018</p> <p>Skripsi oleh Dhawi Hilmidia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2019.</p>	<p>- Penelitian deskriptif kualitatif</p> <p>- Konsep kerjasama internasional dan konsep bantuan luar negeri</p>	<p>-Program ini berhasil melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, seperti agroforestry dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.</p> <p>-Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan menunjukkan penerimaan yang positif terhadap program, dengan masyarakat beralih dari praktik lama ke metode baru yang lebih ramah lingkungan.</p>
8.	<p>Kerjasama Indonesia dan Jerman Melalui Program FORCLIME (<i>Forest and Climate</i>)</p>	<p>- Penelitian deskriptif kualitatif</p> <p>- Teori hijau</p>	<p>-Hasil menunjukkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Jerman melalui program</p>

	<p><i>Change Programme</i>) Untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo tahun 2017-2020</p> <p>Skripsi oleh Mahendra Andika Mahaluby, Universitas Kristen Satya Wacana, Tahun 2023.</p>	<p>- Konsep kerja sama internasional</p>	<p>FORCLIME berhasil mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca, dengan efektivitas yang terlihat dalam penurunan emisi karbon sebesar 300.000 – 400.000 tCO<sub>2</sub>e di wilayah demonstrasi, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, Malinau, dan Berau.</p>
9.	<p><i>An Overview of The Role of Forests in Climate Change Mitigation</i></p> <p>Jurnal Artikel oleh Kyriaki Psistaki, Georgios Tsantopoulos, Anastasia K. Paschalidou, Universitas Demokritus Thrace Yunani, Tahun 2024.</p>	<p>- Penelitian kualitatif deskriptif - Tinjauan literatur review</p>	<p>- Dampak positif dari hutan tidak hanya terbatas pada aspek karbon, tetapi juga memberikan manfaat tambahan seperti konservasi biodiversitas, peningkatan kualitas udara dan air, serta kontribusi positif terhadap kesehatan mental manusia. Namun, efektivitas tindakan reforestasi dan aforestasi sangat bergantung pada perencanaan yang strategis, kondisi lokal, dan pengelolaan yang tepat, yang harus mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap ekosistem dan ketahanan pangan</p>
10.	<p>Implementasi Kebijakan dan Intervensi Politik terkait Lingkungan</p>	<p>- Penelitian deskriptif analitis - Analisis konseptual</p>	<p>- Implementasi kebijakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan</p>

	<p>Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan</p> <p>Jurnal Artikel oleh Irwan Parlaungan Panjaitan, Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, Tahun 2024.</p>	<p>menggunakan pendekatan hukum dan politik dalam konteks pembangunan berkelanjutan</p>	<p>Lingkungan Hidup tidak sepenuhnya berjalan efektif dan malah berkontribusi pada perusakan lingkungan. Penelitian mengeksplorasi kasus lumpur Lapindo sebagai contoh konkret dari kesalahan dalam pengelolaan kebijakan lingkungan dan intervensi politik yang memengaruhi keputusan hukum. Selain itu, penulis menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan seharusnya mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi secara proporsional untuk menghindari kerusakan alam yang lebih parah.</p> <p>- Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara hukum, kebijakan, dan peran masyarakat dalam melindungi sumber daya alam.</p>
11.	<p>Peran Indonesia sebagai Aktor dalam Politik Lingkungan Global melalui Program Forclime</p> <p>Skripsi oleh Reiva Alifia Hannizza, Universitas</p>	<p>- Penelitian deskriptif kualitatif</p> <p>- Teori <i>Actors in The Enviromental Arena</i></p>	<p>- Program ini didasarkan pada norma-norma internasional mengenai perlindungan lingkungan, seperti yang dijelajahi dalam kerangka UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)</p>

	Muhammadiyah Malang, Tahun 2021.		-Melalui pendekatan berbasis teknis dan finansial, kerja sama antara Indonesia dan Jerman diharapkan dapat menciptakan sinergi yang mendukung kebijakan lingkungan yang lebih efektif.
--	-------------------------------------	--	--

Sumber: Diolah peneliti 2025

## 1.5 Kerangka Teori

### 1.5.1 *Actors in The Environmental Arena*

Teori *Actors in the Environmental Arena* dikembangkan oleh Pamela S. Chasek bersama David L. Downie dan Janet Welsh Brown sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis dinamika kebijakan lingkungan global. Teori ini pertama kali diperkenalkan dalam buku mereka yang berjudul *Global Environmental Politics*, edisi pertama terbit pada tahun 2000.<sup>28</sup> Teori ini muncul dari keprihatinan terhadap kompleksitas tata kelola lingkungan global yang tidak lagi dapat dijelaskan hanya melalui peran negara semata, melainkan juga oleh keterlibatan aktor non-negara seperti LSM, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Meskipun demikian, Pamela Chasek menekankan bahwa negara-bangsa (*nation-state*) tetap merupakan aktor utama dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan lingkungan, terutama melalui negosiasi multilateral dan perjanjian internasional.

<sup>28</sup> Pamela S. Chasek, David Leonard Downie, and Janet Welsh Brown, *Global Environmental Politics : Seventh Edition, Dilemmas in World Politics*, Routledge, 2018, <https://www.routledge.com/>.

Chasek menggarisbawahi bahwa peran negara dalam arena lingkungan global sangat ditentukan oleh kapasitas institusional, kepentingan nasional, serta posisi politik dan ekonomi mereka dalam sistem internasional.<sup>29</sup> Di dalam bukunya Chasek membagi kedalam empat klasifikasi, yaitu negara dapat berperan sebagai:

1. *Lead State*

Adalah negara yang mengambil peran utama atau kepemimpinan dalam isu-isu lingkungan global. Negara ini biasanya memiliki kebijakan lingkungan yang progresif, sumber daya yang besar, dan kemauan politik untuk mendorong agenda lingkungan di forum Internasional.

2. *Supporting State*

Adalah negara yang mendukung atau bekerja sama dengan *lead state* dalam mencapai tujuan lingkungan. Negara-negara ini mungkin tidak memiliki sumber daya atau pengaruh yang sama dengan *lead state*, tetapi mereka memainkan peran penting dalam membangun koalisi dan menerapkan kebijakan lingkungan.

3. *Swing State*

Dalam konteks politik lingkungan, *swing state* didefinisikan oleh negara dengan posisi ambivalen atau fleksibel, tidak konsisten berpihak pada *lead state* maupun pada kubu yang menolak agenda lingkungan. Mereka bisa menentukan arah hasil perundingan karena bobot pengaruhnya dan memiliki kebijakan lingkungan yang bervariasi tergantung pada pemerintahan yang berkuasa.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 52.

#### 4. *Veto State*

Adalah negara yang secara aktif menolak atau menghambat kesepakatan lingkungan internasional. Mereka menggunakan hak veto formal maupun informal (penolakan politik, penarikan diri, atau tidak meratifikasi perjanjian).

Posisi diatas ditentukan oleh 4 faktor yaitu:

1. Faktor Politik Dalam Negeri, dinamika politik dalam negeri sangat memengaruhi, terutama bagaimana kepentingan elite politik, kelompok bisnis, opini public menekan pemerintah dalam mengambil sikap terhadap isu lingkungan.
2. Perbandingan Biaya dan Manfaat, negara akan selalu memepertimbangkan perbandingan biaya dan manfaat. Yakni sejauh mana kebijakan lingkungan dapat menguntungkan pembangunan ekonomi atau justru menimbulkan beban fiskal yang besar.
3. Pertimbangan Politik dan Diplomatik Internasional, juga berperan penting karena posisi negara dalam perundingan global kerap dipengaruhi oleh kebutuhan menjaga reputasi, hubungan strategis, dan akses terhadap bantuan internasional.
4. Aktor Subnasional, seperti pemerintah daerah, masyarakat sipil, LSM, maupun komunitas bisnis lokal, turut memberi tekanan yang bisa mendorong atau justru menghambat komitmen negara di arena lingkungan global.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 53

Keempat faktor diatas saling terkait dan menentukan apakah suatu negara tampil sebagai pemimpin, pendukung, penentu arah, atau bahkan penghambat dalam negosiasi lingkungan internasional. Sehingga klasifikasi ini memberikan pemahaman yang lebih dinamis mengenai peran negara, tidak hanya sebagai entitas homogen, tetapi sebagai aktor yang memiliki posisi dan strategi yang berbeda-beda tergantung pada isu yang dihadapi. Dalam konteks skripsi ini, yang berjudul Peran Indonesia sebagai Aktor dalam Politik Lingkungan Global melalui Program Forclime, penggunaan teori ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis bagaimana dua negara yaitu Jerman dan Indonesia berinteraksi dalam kerja sama bilateral di bidang lingkungan, dengan tujuan untuk mengurangi emisi GRK yang disebabkan oleh deforestasi hutan dan kerusakan pada hutan.

Teori ini tidak hanya menggambarkan peran negara secara statis, tetapi juga menekankan pentingnya dinamika relasi antarnegara dalam konteks lingkungan. Hal ini sejalan dengan gagasan Chasek bahwa peran nation-state tidak bisa dipisahkan dari interaksinya dengan aktor lain di arena lingkungan global, terutama ketika negara tersebut menerima dukungan teknis dan finansial dari negara donor. Lebih jauh, perkembangan teori ini dari waktu ke waktu mencerminkan respons terhadap perubahan lanskap global. Dalam edisi-edisi terbaru dari *Global Environmental Politics*, Chasek mengakui meningkatnya peran negara-negara berkembang dalam mendorong agenda keberlanjutan, baik sebagai penerima maupun penyumbang solusi.<sup>31</sup> Dengan demikian, konteks FORCLIME, Indonesia

---

<sup>31</sup> *Ibid.* 54

tidak lagi diposisikan semata sebagai penerima bantuan pasif, tetapi juga sebagai aktor strategis yang dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk memperkuat kapasitas nasionalnya dalam menghadapi krisis iklim.

Dalam buku *Global Environmental Politics*, Pamela Chasek mengembangkan teori *Actors in the Environmental Arena*, yang menjelaskan berbagai macam aktor yang terlibat dalam tata kelola lingkungan global. Dalam teori ini, terdapat beberapa peran utama, yaitu: *nation-state*, organisasi pemerintah internasional (*intergovernmental organizations*), sekretariat perjanjian internasional (*treaty secretariats*), lembaga keuangan internasional (*international financial institutions*), organisasi regional dan multilateral lainnya (*regional and other multilateral organizations*), serta dunia usaha dan industri (*business and industry*).

Secara khusus, penelitian ini merujuk pada peran *nation-state*. Negara-bangsa tetap menjadi aktor utama dalam proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan, termasuk dalam konteks kerjasama bilateral seperti program FORCLIME. Keterkaitan dengan judul penelitian menegaskan bahwa Indonesia sebagai *nation-state* mempunyai peran sentral dalam memediasi dan mengoptimalkan kolaborasi internasional dengan Jerman untuk pengelolaan lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.<sup>32</sup>

Posisi negara dalam kategori yang telah dikasifikasikan oleh Chasek ini, dipengaruhi oleh faktor politik domestik yang berkaitan dengan kondisi politik

---

<sup>32</sup> *Ibid.* 54

internal dan kepentingan nasional, serta pertimbangan biaya dan manfaat dibandingkan peluang dan risiko yang dihadapi. Selain itu, pertimbangan politik dan diplomatik internasional berhubungan dengan hubungan dan strategi negara dalam konteks global, sementara aktor subnasional seperti pemerintah daerah dan masyarakat lokal turut memengaruhi posisi dan kebijakan nasional secara keseluruhan.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif, metode ini bertujuan untuk memahami objek penelitian secara mendalam. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor mendasar penyebab suatu fenomena atau masalah yang diteliti dalam studi kasus.<sup>33</sup> Melalui penelitian ini, penulis akan menguraikan terkait bagaimana peran Indonesia sebagai aktor dalam politik lingkungan global melalui program Forclime (*Forest and Climate Change*).

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen research, di mana penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang tersaji dalam penelitian

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

ini diambil dari skripsi, jurnal artikel, buku, laporan penelitian, berita, serta sumber-sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan Program FORCLIME dan isu-isu lingkungan di Indonesia. Data yang diperoleh merupakan data primer resmi yang berbentuk dokumen ataupun laporan.

### **1.6.3 Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif, penulis menerapkan metode analisis data kualitatif berbasis studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui peran Indonesia sebagai aktor dalam politik lingkungan global melalui program FORCLIME, dalam pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dalam tiga tahapan, yang pertama data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi terkait program Forclime.

Yang kedua, melakukan analisis data, data yang terkumpul kemudian diringkas dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Kemudian berdasarkan data yang telah disajikan, dilakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan memberikan gambaran mengenai peran Indonesia sebagai aktor dalam politik lingkungan global melalui program FORCLIME.

## 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

### A. Batasan Waktu

Batasan waktu penelitian ini terhitung dari tahun 2010 hingga 2021 untuk mengetahui peran Indonesia sebagai aktor dalam politik lingkungan global melalui *forclime*. Rentang waktu ini penting karena mencakup periode di mana program tersebut beroperasi dengan aktif dan juga dimana program ini berakhir. Dengan memfokuskan pada periode ini, penelitian dapat memberikan analisis yang tepat terhadap peran Indonesia dan keadaan lingkungan selama program berlangsung, serta menjawab tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan dan emisi karbon di Indonesia.

### B. Batasan Materi

Batasan materi yang digunakan dalam penelitian ini akan berfokus pada peran Indonesia sebagai aktor dalam politik lingkungan global melalui pengelolaan hutan tropis dalam pengurangan emisi karbon gas rumah kaca di Indonesia dan kerjasama dalam program Forclime.

## 1.7 Argumen Dasar

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan dan berdasarkan teori yang telah dipaparkan, dapat disampaikan bahwa kerja sama bilateral antara Jerman dan Indonesia dalam program FORCLIME merupakan manifestasi dari diplomasi lingkungan yang menggabungkan kepentingan strategis dan normatif kedua negara. Keterlibatan Indonesia dalam program FORCLIME oleh Jerman mencerminkan peran aktif kedua negara melalui kerjasama bilateral dalam politik lingkungan global. Melalui kemitraan dengan Jerman, Indonesia tidak hanya berperan sebagai penerima bantuan teknis dan finansial, tetapi juga sebagai aktor yang secara strategis memanfaatkan kerja sama bilateral untuk memperkuat posisi dan legitimasi politik lingkungannya di tataran global.

Di satu sisi, Jerman sebagai negara maju berkepentingan untuk memperkuat citra globalnya dalam isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, serta memenuhi komitmen internasionalnya dalam pengurangan emisi karbon. Di sisi lain, Indonesia memanfaatkan kerja sama ini untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan secara lestari dan memperkuat komitmennya terhadap Paris Agreement melalui skema *Nationally Determined Contribution* (NDC).

## 1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

JUDUL	PEMBAHASAN
<p><b>BAB I</b> Pendahuluan</p>	<p>1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian     1.3.1 Tujuan Penelitian     1.3.2 Manfaat Penelitian         1.3.2.1 Manfaat Akademis         1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Teori     1.5.1 <i>Actors in the Enviromental Arena</i> 1.6 Metode Penelitian     1.6.1 Jenis Penelitian     1.6.2 Teknik Pengumpulan data     1.6.3 Metode Analisis     1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian         1.6.4.1 Batasan Waktu         1.6.4.2 Batasan Materi 1.7 Argumen Sementara 1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p><b>BAB II</b> Forclime sebagai Respon terhadap Isu Lingkungan dan Kondisi Hutan di Indonesia</p>	<p>2.1 Indonesia dan Isu Lingkungan     2.1.1 Permasalahan Lingkungan Domestik     2.1.2 Isu Lingkungan Global     2.1.3 Kondisi Hutan di Indonesia 2.2 <i>Forest and Climate Change Programme</i> (Forclime)     2.2.1 Implementasi Program Forclime</p>
<p><b>BAB III</b> Analisis Peran Indonesia dalam Politik Lingkungan Global melalui Implementasi FORCLIME</p>	<p>3.1 Indonesia dan Kerjasama Lingkungan Internasional 3.2 Dinamika Faktor Penentu Implementasi Forclime     A. Faktor Politik Dalam Negeri     B. Perbandingan Biaya dan Manfaat     C. Pertimbangan Politik dan Diplomatik Internasional     D. Aktor Subnasional</p>
<p><b>BAB IV</b> Penutup</p>	<p>4.1 Kesimpulan 4.2 Saran</p>